

## **Studi tentang Kebijakan Pemerintah Kecamatan dalam Upaya Swasembada Beras Adan di Kecamatan Krayan**

**Martiolen<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana kebijakan pemerintah Kecamatan Krayan Barat dalam mempertahankan keaslian beras adan dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi beras adan khususnya di Lokasi Kurid, Kebijakan pemerintah Kecamatan diperuntuhkan sebagai tolak ukur untuk keberlangsungan produksi beras adan serta turut campur tangan pemerintah kecamatan sangat di butuhkan oleh masyarakat petani beras adan untuk meningkatkan produksi beras adan yang mereka tanam serta perlindungan atas keabsahan beras adan yang mereka kelola, dengan fokus penelitian kebijakan pemerintah dalam meningkatkan swasembada produksi beras adan, dan kebijakan pemerintah kecamatan dalam rangka mempertahankan keaslian beras adan serta kebijakan pemerintah dalam rangka pemasaran dari kelebihan produksi beras adan. Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran secara umum mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan dalam upaya meningkatkan produksi beras adan dan dalam rangka mempertahankan beras adan serta pemasan dari kelebihan produksi. Upaya pemerintah Kecamatan sudah cukup baik untuk meningkatkan hasil produksi beras adan program-program yang sudah di lakukan oleh pemerntah kecamatan dan desa pun sudah cukup membantu masyarakat lokasi kurid dalam meningkatakan swasembada produksi beras adan. Komitmen pemerintah dan masyarakat krayan pun cukup baik dalam mempertahankan keorgaikan dan keaslian beras adan yang mereka kembangkan pemerintah kecamatan sangat tegas apa bila ada masyarakat yang menggunakan pupuk kimia untuk lahan sawah mereka.*

**Kata Kunci:** *kebijakan pemerintah, swasembada beras adan, Kecamatan Krayan.*

### **Pendahuluan**

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang memberikan energi dan zat gizi yang tinggi. Beras sebagai komoditas pangan pokok dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan kebutuhan masyarakat terhadap beras semakin besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,36 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami kenaikan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Martiolen97@gmail.comg

sebanyak 4,51 juta ton (6,37 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi tersebut terjadi di Pulau Jawa sebanyak 2,31 juta ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,21 juta ton. Kenaikan produksi padi terjadi karena kenaikan luas panen seluas 0,32 juta hektar (2,31 persen) dan peningkatan produktivitas sebesar 2,04 kuintal/hektar (3,97 persen). Beras telah menjadi komoditas strategis dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Selain sebagai sumber pangan pokok, beras juga menjadi sumber penghasilan bagi petani dan kebutuhan hidup sehari-hari bagi jutaan penduduk. Beras juga bisa dijadikan sebagai komoditas politik karena keberadaannya tidak dapat digantikan oleh komoditas lain dan harus dalam jumlah yang memadai. Meskipun pemerintah telah mengupayakan diversifikasi pangan, namun sampai saat ini belum mampu mengubah preferensi penduduk terhadap bahan pangan beras. Oleh karena itu, ketersediaan beras harus selalu terjaga, berkelanjutan, bahkan harus ditingkatkan. Pembangunan pertanian dalam upaya peningkatan produksi beras terasa semakin berat dan kompleks karena selain dihadapkan pada masalah internal yang klasik juga dihadapkan dengan berbagai macam isu global dan perubahan lingkungan yang semakin buruk. Tingginya permintaan pangan, terutama beras dan peningkatan jumlah penduduk juga menjadi masalah dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, gerakan peningkatan produksi beras nasional melalui perubahan teknologi dan adanya inovasi harus didukung oleh semua daerah di seluruh Indonesia.

Cadangan pangan terutama beras merupakan komponen yang sangat penting dalam penyediaan pangan, karena dapat difungsikan sebagai stabilitor pasokan pangan pada saat produksi atau pasokan tidak mencukupi. Informasi mengenai stok beras ini sangat penting untuk mengetahui situasi ketahanan pangan, baik di tingkat rumah tangga, kabupaten, wilayah maupun nasional. Informasi stok beras pemerintah relatif lebih mudah diperoleh karena penyelenggaranya adalah instansi pemerintah (pada saat ini Bulog). Namun demikian, informasi mengenai stok gabah/beras di masyarakat lebih sulit diperoleh dan data stok ini tidak tersedia secara rutin. Di sisi lain data stok ini sangat dibutuhkan dalam penentuan kebijakan sektor pertanian karena menyangkut ketersediaan pangan di suatu wilayah.

Kecamatan Krayan Barat yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Serawak-Malaysia yang berpusat pemerintahan di Lembudud. Berada pada ketinggian sekitar 1090,24 mm di atas permukaan laut dengan Jumlah Penduduk Kecamatan Krayan sebanyak 13.837 jiwa, yang sebagian besarnya ialah Suku Asli Pedalaman Kalimantan Utara yaitu, Suku Dayak Lundayeh. Masyarakat Dayak Lundayeh sebagian besar merupakan petani padi ladang dan sawah.

Beras Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, yang terkenal pulen, legit, dan aromatik. Penanaman padi diolah secara organik dengan memanfaatkan kotoran kerbau sebagai input pemupukan. Cita rasa Beras Adan Krayan tidak bisa ditemukan di wilayah lain hal ini merupakan

satu keunikan tersendiri. Dengan keunggulan yang dimiliki maka Beras Adan dikonsumsi secara luas di Malaysia dan Brunei Darussalam bahkan konon keluarga kerajaan Brunei Darussalam gemar mengkonsumsi Beras Adan Krayan sebagai sumber makanan pokok sehari-hari.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan***

Seringkali istilah kebijakan atau kebijaksanaan disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal ini disebabkan oleh belum diketahui dan belum dijumpainya terjemahan yang tepat sampai saat ini untuk istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia.

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2004: 55) menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan (Suharto, 2006).

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul Wahab (1991: 36) dalam buku *analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara* mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan:

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
2. Menentukan standar pelaksanaan.
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan:

1. Menentukan jadwal.
2. Melakukan pemantauan.
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau

pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.  
(Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1991: 36)

### ***Pemerintah***

Menurut Tjandra (2008: 23-24) istilah pemerintah dalam bahasa Inggris disebut dengan “*government*”. Dalam bahasa Perancis dikenal istilah “*gouvernement*” yang kedua-duanya berasal dari perkataan latin *gubernaculum*”, artinya “kemudi”, disalin dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dengan “pemerintah”, atau “pemerintahan” dan kadang-kadang juga dengan “penguasa”. Menurut Tjandra istilah Pemerintah dalam negara hukum modern sering dipadankan dengan istilah dalam bahasa Belanda “*bestuur*” yang oleh Hadjon dinyatakan bahwa “*bestuur*” pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Tjandra 2009 : 197).

### ***Masyarakat***

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11), bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22),

### ***Swasembada***

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat pengertian swasembada sebagai usaha memenuhi kebutuhan sendiri (beras, dan sebagainya). Swasembada pangan bisa kita artikan sebagai kemampuan untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi dan konsistensi kebijakan.

PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, mengatur tentang ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional.

PP Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan serta peran masyarakat mengenai hal-hal di bidang mutu dan gizi pangan.

### ***Pemasaran***

Pemasaran, menurut Daryanto (2011 : 1) adalah “suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain”.

Pemasaran (*marketing*) menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 6) yaitu “sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkan nilai dari pelanggan sebagai imbalannya”.

Sedang definisi menurut William J. Stanton, (1984:7) yaitu: “Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial”. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Basu dan Hani 2004:4).

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, suatu metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan permasalahan atau kejadian serta bentuk-bentuk fenomena yang menjadi variabel penelitian.

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik penelitian lapangan (*field work research*), dalam penelitian lapangan penulis langsung berhadapan dengan objek yang diteliti, penelitian lapangan meliputi : Observasi,wawancara,dokumentasi. penulis menggunakan teknik wawancara terbuka, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan dengan pemerintah kecamatan dan desa ( Camat sebagai kay infoman), dan masyarakat sebagai informan pendukung.

## Hasil dan Pembahasan

Untuk kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh pememrintah kecamatan sampai saat ini masih belum ada yang ada hanya kebijakan yang dilakukan oleh camat atas dasar kekuasaan. Sambil menunggu kebijakan tertulis yang di usulkan oleh pemerintah kecamatan diresmikan oleh kabupaten.

Seperti yang dikatakan Bapak Yuni Sere selaku Camat Krayan Barat :

“Kebijakan sudah saya buat tetapi untuk kebijakan tertulis masih dalam proses pengesahan, sudah saya usulkan kepada bupati mengenai pertanian organik beras adan hanya saja menunggu waktu bupati nunukan mengesahkan untuk pertanian organik yang ada di lokasi kurid sendiri.(15 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis melihat upaya yang masih dilakukan oleh kecamatan krayan barat sampai saat ini adalah memberi wawasan kepada petani agar selalu mempertahankan pertanian organik yang mereka kembangkan. Kecamatan tidak hanya memberikan wawasan kepada petani tetapi kecamatan juga mengupayakan untuk penambahan kerbau di wialayah kurid sebagai tenaga pembantu petani dalam membajak sawah mereka selain membantu petani beras adan dalam membajak sawah fungsi lain dari kerbau yaitu kotoran kerbau sebagai pupuk organik untuk lahan sawah mereka. Camat juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menjual kerbau yang mereka gunakan untuk membajak sawah dikarenakan apabila kerbau berkurang maka pupuk organik akan sangat berkurang menyebabkan pertanian organik terancam gagal.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan krayan barat.

Program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan krayan barat untuk meningkatkan produksi beras adan antara lain :

- 1). Pertanian berbasis organik.
- 2). Perluasan sawah dan membuka lahan tidur.
- 3). Membuka UPTD di bidang hewan ternak khususnya hewan Kerbau.
- 4). Membangun Irigasi di setiap sektor sawah yang ada di wilayah kurid.
- 5). Membangun Jalan Tani.
- 6).Pembagian Gilingan Padi.

Diatas merupakan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan krayan barat hanya saja poin 3 masih dalam proses pembangunan dikarenakan lahan yang dibutuhkan oleh UPTD masih belum cukup untuk mengembangkan perternakan yang akan dilaksanakan di kecamatan krayan barat. Turut campur tangan pemerintah dalam meningkatkan produksi beras adan ini sudah cukup baik program-program yang dicadangkan juga sangat membantu masyarakat kurid dalam meningkatkan produksi mereka.

Seperti yang dikatakan Bapak Yuni Sere selaku camat krayan barat :“Dengan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan saya sangat berharap produksi beras adan dapat meningkat dari pada sebelumnya sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kelebihan produksi dapat

dijual oleh masyarakat petani beras adan untuk keberlangsungan perekonomian mereka”.(15 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat mengambil garis besar mengenai program pemerintah kecamatan krayan barat berfungsi untuk meningkatkan produksi beras adan khususnya di wilayah kurid sendiri harapan pemerintah kecamatan agar produksi meningkat dari pada sebelumnya.

Kebijakan pemerintah kecamatan krayan barat dalam mempertahankan keaslian Keras Adan. Melihat masyarakat kurid yang hampir semuanya usaha tani beras adan ini maka pemerintah kecamatan pun menjadikan kurid sebagai fokus utama dalam sektor pertanian agar masyarakat petani yang ada di kurid dapat berkembang di bidang pertanian yang mereka kerjakan dan perekonomian masyarakat kurid pun dapat meningkat dari yang sebelumnya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yuni Sere selaku camat krayan barat :“Kecamatan Krayan barat sudah mengupayakan untuk mempertahankan keaslian beras adan, selain itu juga krayan secara keseluruhan sudah mendeklarasi bahwa masyarakat krayan adalah masyarakat petani beras adan”. (15 Agustus 2017).

Dari pernyataan di atas maka penulis melihat kecamatan krayan barat sangat memperhatikan keaslian dan keorganikan akan sektor pertanian di wilayahnya. Beras Adan pada umumnya tidak hanya ada di wilayah kurid tetapi beras adan juga ada di wilayah lainnya yang ada di kecamatan krayan tetapi wilayah kurid memiliki suatu ciri khas sendiri dari pada wilayah yang lainnya oleh karena itu potensi dan kualitas beras kurid sangat dicari oleh para pemborong baik dalam negeri maupun keluar negeri. Untuk itu camat Krayan Barat sangat menegaskan di wilayah kurid untuk tidak menggunakan pupuk kimia agar kualitas beras yang sudah teruji kualitasnya tidak punah dan rusak oleh pupuk kimia.

Seperti yang dikatakan Bapak Yuni Sere selaku Camat Krayan Barat :“Saya sangat menghimbau kepada masyarakat petani beras adan agar tidak menggunakan pupuk kimia dalam bentuk apapun untuk di pergunakan ke dalam sawah. Tetapi saya memberikan sosialisai dan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya menggunakan pupuk organik untuk sebuah kualitas padi yang berkualitas tinggi dan saya rasa masyarakat cukup antusias tidak menggunakan pupuk kimia”.(15 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis melihat kecamatan krayan barat sangat menegaskan kepada petani beras adan supaya tidak menggunakan pupuk kimia dalam bentuk apapun selain itu juga pemerintah kecamatan melarang pupuk kimia untuk diperjual-belikan.

Kebijakan Pemerintah Kecamatan dalam Pemasaran Beras Adan. Turut campur tangan pemerintah kecamatan dalam rangka pemasaran beras adan sampai saat ini masih belum ada, hanya saja pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memperjual-belikan beras adan tetapi dengan satu hal kebutuhan masyarakat harus terpenuhi terlebih dahulu. Apabila kebutuhan terpenuhi

maka masyarakat diperbolehkan untuk memasarkan beras adan ke dalam Negeri maupun Keluar negeri.

Seperti yang dikatakan Bapak Yuni Sere selaku camat krayan barat :

Untuk aturan yang mengtur masalah pemasaran memang belum ada yang ada hanya aturan untuk patokan harga beras adan. Sistem pemasaran yang ada di wilayah kecamatan krayan adalah sistem kekeluargaan petani menjual beras kepada masyarakat malaysia dan masyarakat malaysia memberikan barang untuk kebutuhan masyarakat krayan jadi masyarakat malaysia dan masyarakat krayan saling bergantung.(15 Agustus 2017)

Dari wawancara diatas penulis juga mendapatkan informasi tambahan dari camat krayan barat bahwa untuk MOU antara Indonesia dan Malaysia sudah diupayakan oleh pemerintah kecamatan tetapi masih belum ada konfirmasi dari pemerintah kabupaten nunkan untuk kerja sama tersebut oleh karena itu pemerintah kecamatan krayan barat memberikan wewenang kepada msayarakat untuk menjual beras mereka keluar tanpa ikut campur pemerintah kecamatan.

Strategi Pemerintah Kecamatan dalam upaya Peningkatan Hasil Produksi Beras Adan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan krayan barat dalam meningkatkan hasil produksi masyarakat kurid adalah perluasan sawah,irigasi dan bantuan hewan kerbau kepada masyarakat petani beras adan. Pemerintah melakukan perluasan sawah untuk msayarakat petani beras adan agar produksi beras adan semakin meningkat dan kebutuhan masyarakat petani beras adan melebihi dari yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat menjual beras tanpa takut kekurangan dan bantuan hewan kerbau yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai bantuan tenaga untuk petani dalam membajak sawah dan kotoran kerbau sebagai pupuk organik bagi sawah mereka, sehingga hasil padi meningkat dan kualitas beras adan tetap terjaga.

Seperti yang dikatakan Bapak Yuni Sere selaku camat krayan barat :

Pemerintah Kecamatan mengupayakan perluasan sawah untuk petani beras adan agar petani beras adan dapat meningkatkan hasil produksi mereka dan pemerintah kecamatan sangat berharap kepada petani agar menggunakan kotoran kerbau sebagai pupuk untuk sawah mereka sehingga hasil produksi meningkat dan kualitas beras adan tetap terjaga.(15 Agustus 2017)

Kebijakan Pemerintah Kecamatan Krayan Barat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kurid sehingga tidak ada lagi perekonomian di masyarakat kurid di bawah rata-rata.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan penelitian yang berjudul studi tentang kebijakan pemerintah kecamatan dalam upaya swasembada beras adan masyarakat dayak lundayeh maka dapat disimpulkan dan dapat dilihat dari beberapa fokus dibawah ini yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kecamatan dalam meningkatkan swasembada beras produksi beras adan secara garis besar sudah berjalan dengan baik.

Kebijakan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka meningkatkan produksi beras adan tersebut sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lokasi Kurid, program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya peningkatan swasembada beras adan sudah cukup baik.

2. Upaya-upaya Pemerintah Kecamatan Krayan Barat dalam rangka mempertahankan keaslian beras adan sudah berjalan cukup baik. Komitmen Pemerintah Kecamatan untuk mempertahankan keaslian beras adan tersebut juga sangat di rasakan masyarakat Lokasi Kurid. Karena adanya Komitmen Pemerintah Kecamatan dan masyarakat petani beras adan.
3. Turut campur tangan Pemerintah Kecamatan dalam rangka pemasaran beras adan dari kelebihan produksi adalah menetapkan harga penjualan beras untuk dipasarkan kedalam dan keluar Negeri.
4. Pemerintah Kecamatan memberikan hak dan kebebasan kepada masyarakat untuk menjual beras adan mereka tetapi kebutuhan masyarakat di daerah harus terpenuhi terlebih dahulu apabila ada kelebihan produksi beras adan maka masyarakat diperbolehkan untuk menjual beras. Sistem penjualan keluar negeri pun menggunakan sistem kekeluargaan.

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pihak Kecamatan Krayan Barat. Selama penulis melakukan penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan untuk perkembangan sektor pertanian beras adan yang ada di Lokasi Kurid :

1. Kebijakan pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan produksi beras adan harus di dukung dengan akses jalan desa dalam menjual beras adan mereka dapat berjalan lancar. Masyarakat petani beras adan dalam menjual kelebihan produksi mereka sedikit terhambat dikarenakan akses jalan yang tidak memadai, untutk itu penulis mengharapkan permasalahan ini dapat diatasi dengan cepat oleh Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.
2. Upaya-upaya pemerintah kecamatan dalam mempertahankan keaslian beras adan sudah cukup baik hanya saja masyarakat petani beras adan masih mendapatkan masalah hama penyakit tanaman. Sementara Pemerintah Kecamatan melarang keras bahan kimia dalam bentuk apa pun untuk membasmi hama tanaman padi terkadang diserang oleh hama selagi masyarakat tidak bisa mencegah hama tersebut dengan bahan kimia yang sangat dilarang untuk pertanian organik oleh Karena itu Pemerintah Kecamatan harus mencari solusi yang tepat untuk mencegah hama terkait di sektor pertanian masyarakat khususnya yang berkaitan dengan produksi beras adan.
3. Turut campur tangan Pemerintah Kecamatan dalam rangka pemasaran dari kelebihan produksi sampai saat ini sangat diharapkan dalam pemasaran beras adan dalam pemasaran beras. Agar mereka dapat lebih

di perhatikan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten dengan membuka wadah ataupun melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Malaysia untuk pemasaran beras adan.

**Daftar Pustaka :**

Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.

Ridwan Tjandra 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Soleman B. Taneko, 1984. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, CV. Rajawali, Jakarta.

Daryanto, 2011, *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*, Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera

William J. Stanton. 1984. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta. Erlangga

Soekanto, Soerjono. , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

**Dokumen-Dokumen :**

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 35 Tahun 2003

**Sumber Internet :**

<http://demokrasipancasilaindonesia..co.id/2014/12/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html>.(19 Januari 2017)

<http://www.seputarpengertian.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-lengkap.html>.19 januari 2017

<http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/ekspor.html>(20 januari 2017)